

BAB V
Arah Pembangunan Kota Pasuruan 2006 - 2025

5.1 Sasaran dan Arah Pembangunan

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
1	Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal			
	Pendidikan	1 Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa	1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Dinas Pendidikan
			2 Mengembangkan prasarana dan sarana serta lembaga keagamaan	
			3 Meningkatkan pelayanan keagamaan dan partisipasi antar umat beragama pada proses pembangunan	
			4 Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	
			5 Meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah	
	2 Meningkatkan toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan	1 Meningkatkan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama		
	Kebudayaan	1 Menguatnya nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat	1 Memantapkan ketahanan budaya masyarakat	Disporabud
			2 Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian dan moralitas masyarakat	
		2 Terbentuknya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya lokal dalam dinamika pergaulan	1 Memantapkan serta penguatan identitas dan jati diri masyarakat	
2 Merevitalisasi, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat				
3 Berkembangnya seni dan budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar pada warisan leluhur		1 Mengembangkan prasarana dan sarana budaya		
		1 Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur		
2 Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional				
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			
	Pendidikan	1 Meningkatkan akses pelayanan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas	1 Meningkatkan pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan	Dinas Pendidikan
			2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang bermutu dan merata	
			3 Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dengan standar yang memadai, disertai upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan	
			4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
		2 Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan formal dan nonformal	1 Meningkatkan sistem pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas 2 Meningkatkan pola dan kultur belajar siswa ke arah pembentukan budaya belajar agar dapat mengembangkan potensi dirinya	
		3 Meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan yang efektif, berbasis kompetensi dan berorientasi pada kualitas lulusan	1 Mengembangkan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional 2 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pendidikan yang berkualitas bagi pemangku-kepentingan untuk peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	
	Kesehatan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil, merata, dan terjangkau	1 Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok sosial 2 Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau 3 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas	Dinas Kesehatan & RSUD
		2 Terpenuhinya prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas	1 Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana kesehatan serta ketersediaan tenaga medis yang memadai 2 Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan	
		3 Meningkatkan kesadaran akan perilaku dan lingkungan sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat	1 Meningkatkan sosialisasi hidup sehat	
	Tenaga Kerja	1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja	1 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan saran ketenagakerjaan 2 Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja untuk pasar tenaga kerja di dalam maupun luar daerah 3 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha	Dinsosnakertrans
		2 Meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja	1 Meningkatkan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, dan jasa	
		3 Meningkatkan ketersediaan informasi ketenagakerjaan	1 Meningkatkan ketersediaan informasi pasar tenaga kerja, angkatan kerja dan formasi lapangan kerja	
		4 Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	1 Meningkatkan perlindungan dan pengawasan kesehatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja pada sektor formal 2 Peningkatan kualitas hubungan industrial pancasila	
	Kepemudaan dan Olahraga	1 Terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku kepemudaan yang mandiri dan kreatif	1 Meningkatkan kualitas kepemudaan agar menjadi modal manusia (<i>human capital</i>) yang memiliki karakter dan daya saing	Disporabud
		2 Meningkatkan kualitas dan partisipasi kepemudaan dalam pembangunan	1 Mengembangkan peran aktif kepemudaan dalam pembangunan	

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
		3 Meningkatkan pengembangan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan	1 Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat serta memberikan kesempatan dan kebebasan berorganisasi sebagai wahana pendewasaan diri	
		4 Meningkatkan minat keolahragaan masyarakat, baik yang mengarah pada kekeolahragaan sebagai budaya maupun keolahragaan sebagai prestasi	1 Peningkatan kualitas aktivitas keolahragaan yang diarahkan pada budaya berkeolahragaan dan keolahragaan prestasi 2 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat 2 Meningkatnya pelayanan dan penanganan sosial pada anak dan perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		2 menguatnya kelembagaan dan pangarusutamaan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan	1 Penguatan kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan 2 Memperluas akses kaum perempuan ke sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha	
		3 Terjaminnya pangarusutamaan jender dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik	1 Peningkatan jaminan pangarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan publik dan program pembangunan, untuk memberikan peran perempuan yang lebih besar di berbagai bidang pembangunan	
	Keluarga Berencana	1 Meningkatkan kinerja keluarga berencana melalui perbaikan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, merata dan bermutu	1 Meningkatkan peran keluarga berencana (KB) dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peyediaan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas 2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana keluarga berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		2 Terbentuknya keluarga kecil yang harmonis	1 Meningkatkan peran aktif pasangan usia muda dan menyiapkan remaja dalam membentuk keluarga berencana	
		3 Meningkatkan peran keluarga sejahtera sebagai tempat pendidikan anak	1 Meningkatkan peran keluarga sejahtera sebagai media pendidikan yang pertama dan utama bagi anak	
	Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk baik secara alamiah (pengendalian tingkat kelahiran) maupun migrasi	1 Peningkatan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk antar wilayah	Dispendukcapil
		2 Meningkatnya pemerataan sebaran penduduk, yang ditunjang dengan pemerataan pembangunan antar wilayah	1 Penataan pesebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju pesebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah	

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD	
		3 Meningkatkan kinerja administrasi kependudukan, khususnya dalam menyediakan data-data demografi yang handal dan mampu menunjang kebijakan kependudukan	1 Penataan sistem administrasi kependudukan yang mampu menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. 2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana kependudukan yang layak		
	Sosial	1 Terwujudnya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya 2 Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 3 Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial	Dinsosnakertrans	
		2 Terwujudnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	1 Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan 2 Peningkatan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial		
		3 Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Kota Pasuruan	1 Meningkatkan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana sosial yang layak		
	Transmigrasi	1 Meningkatnya animo masyarakat untuk bertransmigrasi	1 Memberikan motivasi bagi masyarakat untuk menumbuhkan minat bertransmigrasi 2 Menyiapkan masyarakat yang berminat untuk bertransmigrasi 3 Meningkatkan pelayanan terhadap calon transmigran		Dinsosnakertrans
		2 Meningkatnya hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi	1 Meningkatkan kerjasama yang harmonis untuk memperoleh informasi daerah transmigrasi		
	Pemberdayaan Masyarakat	1 Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	1 Pengembangan modal sosial dan pengembangan institusi masyarakat		Badan Pemberdayaan Masyarakat
		2 Meningkatnya akses pelayanan bagi lembaga kemasyarakatan	2 Meningkatkan peran serta lembaga dalam memberdayakan masyarakat		
	Ketahanan Pangan	1 Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan merata di tingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau	1 Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya	Kantor Ketahanan pangan	
		2 Terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian lokal	1 Meningkatkan pemerataan ketersediaan pangan secara terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal		
		3 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ketahanan pangan	1 Pengembangan sistem ketahanan pangan sampai pada kemampuan untuk menjaga kemandirian pangan		

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	Perencanaan Pembangunan dan Statistik	1 Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar sektor, dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat, potensi sumber daya lokal dan dinamika politik lokal	1 Peningkatan integrasi perencanaan pembangunan antar waktu, antar sektor berdasarkan pada sistem dan mekanisme yang sesuai dengan regulasi dan potensi daerah	Bappeda
		2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melalui penetapan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
		3 Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja pembangunan	1 Memperbaiki penyusunan indikator kinerja dan penetapan target kinerja, yang mengarah pada obyektifitas dan keterukuran	
		4 Meningkatnya ketersediaan informasi dan data bagi penyusunan rencana pembangunan	1 Meningkatkan kualitas informasi dan data pembangunan	
	Perpustakaan dan Kearsipan	1 Terciptanya sistem kearsipan dan dokumentasi yang efektif dan efisien serta mampu memenuhi kebutuhan internal organisasi dan masyarakat	1 Peningkatan sistem kearsipan dan dokumentasi yang handal sehingga dapat mendukung sistem pengambilan keputusan pemerintah daerah secara keseluruhan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
		2 Berkembangnya peran strategis kearsipan bagi pengambilan kebijakan pemerintah daerah	1 Peningkatan pelayanan kearsipan dan dokumentasi yang lebih baik bagi kebutuhan masyarakat	
		3 Terwujudnya perkembangan minat baca dan tulis di kalangan masyarakat,	1 Peningkatan minat baca masyarakat dalam rangka mencerdaskan bangsa	
		4 Tersedianya prasarana dan sarana pelayanan perpustakaan	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kearsipan dan perpustakaan	
	Komunikasi dan Informatika	1 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan;	1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan pemerintahan; 2 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha; 3 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana komunikasi	Dishubkominfo
		2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat, sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan;	1 Peningkatan harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan;	
	Pemerintahan Umum	1 Meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1 Penataan birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel; 2 Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku	Bag. Adm. Organisasi
			3 Mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik	Bag. Humas
			4 Mewujudkan ketertiban sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif dan tidak diskriminatif	Bag. Hukum

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
			5 Meningkatkan ketersediaan aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat;	Badan Kepegawaian Daerah
6 Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan sampai pemberhentian pegawai;	Inspektorat	7 Meningkatkan ketersediaan aparat pengawasan yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi;		
8 Meningkatkan kinerja sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang penyimpangan pelaksanaan pembangunan;		9 Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik		
10 Meningkatkan konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah;		Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bag. Kemasyarakatan Bag. Pembangunan Bag. SDA Bag. Perekonomian Bag. Umum Kec. Bugulkidul Kec. Gadingrejo Kec. Purworejo		
11 Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah.	DPPKA	12 Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif		
13 Mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga legislatif dalam merepresentasikan aspirasi publik dalam pelaksanaan pembangunan		Sekretariat DPRD		
14 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pemerintahan		4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1 Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;	1 Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang ditunjang dengan menguatnya budaya hukum di daerah; 2 Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum; 3 Peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum;	Bakesbanglinmas Kantor Satpol PP Bag. Hukum
2 Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif	1 Menumbuhkan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan			
3 Meningkatnya kesadaran kebangsaan dan politik	1 Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan kehidupan berkebangsaan			

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
		4 Menguatnya kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan;	1 Pembaharuan materi hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan dinamika kehidupan, sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan kesadaran hukum 2 Perwujudan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat;	
		5 Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban yang bersifat antisipatif, persuasif, dan preventif;	1 Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan;	
		6 Meningkatnya kualitas hubungan dan jaringan antar aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial untuk mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram dan damai;	1 Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;	
		7 Meningkatnya kemampuan mengelola risiko ancaman bencana alam.	1 Menumbuhkan masyarakat yang tanggap (<i>responsive community</i>) yang akan mendorong semangat sukarela (<i>spirit of voluntarism</i>) dalam menganggulangi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban;	
5	Mewujudkan pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa yang berbasis ekonomi rakyat dan berwawasan lingkungan			
	Struktur Perekonomian	1 Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah;	1 Memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD, serta antara usahawan besar, menengah, dan kecil;	Bappeda Diskoperindag
		2 Tersedianya prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan: regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal;	1 Pengembangan industri potensial dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal; 2 Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional;	
	Perdagangan	1 Meningkatnya transaksi perdagangan produk-produk sektor unggulan daerah,	1 Penguatan akses dan jaringan perdagangan dalam dan luar negeri	Diskoperindag
		2 Meningkatnya kinerja pasar daerah sebagai pusat aktivitas niaga Kota Pasuruan	1 Penataan ulang peran pasar tradisional dan pasar modern 2 Revitalisasi fungsi pasar daerah sebagai pusat niaga di Kota Pasuruan	
		3 Terjaganya distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau;	1 Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien; 2 Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi lokal dan dalam negeri;	

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
	Perindustrian	1 Menguatnya basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional	1 Penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor basis ekonomi daerah sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif	Diskoperindag
2 Meningkatnya peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah				
3 Meningkatnya peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan		1 Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun internasional;		
4 Meningkatnya penggunaan sumber daya ekonomi lokal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku				
	Pertanian dan Kehutanan	1 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar.	1 Pengembangan teknologi pertanian yang mendukung peningkatan produksi dan pengendalian mutu hasil pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara seimbang dan berkelanjutan, guna mendukung peningkatan ketahanan pangan	Dinas Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan
		2 Peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian		
		2 Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian produktif	1 Peningkatan pengawasan alih fungsi lahan pertanian	
	Perikanan dan Kelautan	1 Meningkatnya produksi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	1 Peningkatan produksi budidaya perikanan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertambakan	Dinas Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan
			2 Peningkatan produksi perikanan tangkap melalui diversifikasi alat tangkap ikan	
			3 Peningkatan pengawasan pelestarian lingkungan laut	
	Pariwisata			Disporabud
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kota Pasuruan, terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausahawan baru;	1 Peningkatan peran koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi masyarakat yang berdaya saing	Diskoperindag
			2 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui penguatan permodalan dan manajemen usaha	
			3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha koperasi	
	Penanaman Modal	1 Terjaminnya kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi;	1 Penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya hubungan bisnis dan kemitraan antara kelompok swadaya, asosiasi, pedagang, investor dan para penyedia jasa;	BPM dan PIT
		2 Terpenuhinya sarana prasarana pendukung investasi;	1 Meningkatkan pelayanan perijinan secara terpadu, mudah dan cepat	
			2 Meningkatkan informasi peluang investasi produk unggulan daerah	

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
	Infrastruktur dan Penataan Ruang	1 Tercapainya percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada sektor-sektor strategis	1 Peningkatan percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada sektor-sektor strategis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum
2 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan pemerintahan dalam rangka peningkatan kemajuan daerah		2 Tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah	1 Peningkatan peran serta masyarakat secara aktif didalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah	
3 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak		1 Peningkatan penyediaan perumahan yang ditunjang dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan fasilitas prasarana dasar permukiman (air bersih, persampahan, drainase dan lain-lain)		
4 Tersedianya jaringan sarana dan prasarana dasar pendukung perumahan yang memadai		1 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan jalan lingkungan		
		2 Pembangunan sarana prasarana penyediaan air secara lestari dan berkelanjutan melalui penanganan sumber daya air terpadu lintas wilayah administratif		
		3 Peningkatan penyediaan jaringan layanan air bersih		
		4 Peningkatan penanganan persampahan, sanitasi dan drainase pada permukiman didukung kesadaran seluruh pihak		
		5 Pemberian ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan dan sanitasi		
5 Mantapnya peranan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan wilayah		1 Melakukan evaluasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) setiap lima tahun sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan wilayah		
2 Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis				
6 Meningkatkan efektifitas langkah-langkah yang tegas dan konsisten dalam penegakkan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang.		1 Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		
		2 Peningkatan penegakan hukum pengaturan rencana tata ruang wilayah, melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pasuruan		
	Pertanahan	1 Terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi tata guna lahan yang sesuai dan konsisten dengan potensi dan daya dukung wilayah; serta mempertimbangkan keserasian pembangunan wilayah sekitarnya	1 Peningkatan administrasi aset tanah yang dikuasai pemerintah, sehingga penggunaan dan tata guna lahan dapat digunakan secara efektif	
2 Terciptanya sistem pengelolaan aset tanah pemerintah daerah yang efisien dan efektif		1 Pemanfaatan aset tanah pemerintah daerah secara optimal		

No.	Misi / Urusan Pemerintahan	Sasaran	Arah Kebijakan	SKPD
	Perhubungan	1 Tersedianya berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran aktivitas perekonomian	1 Penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan yang memadai untuk menunjang kelancaran arus barang dan orang	Dinas Perhubungan
	Lingkungan Hidup	1 Terpeliharanya kelestarian dan keindahan lingkungan untuk menjaga daya dukung sumber daya alam terhadap aktivitas produktif 2 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup 4 Terwujudnya kelengkapan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup	1 Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip <i>re-use</i> , <i>re-duce</i> dan <i>re-cycle</i> dalam bidang persampahan 2 Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik dan privat 3 Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana keindahan kota 1 Pengembangan upaya pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian fungsi dan kualitas lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif 1 Pemanfaatan sumberdaya yang sesuai dengan daya dukungnya dengan memperhatikan daya regenerasinya, khususnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (<i>renewable</i>) 1 Peningkatan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup Peningkatan penegakan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Kantor Lingkungan Hidup